

UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAH
REFORMASI HUKUM MENUJU PEMERINTAHAN DINAMIS

Laode Rudita *)

Abstrak

By the enactment of Law No. 30 of 2014 on Government Administration, Indonesia has entered a new phase in the implementation of the government administrative system. government administrations have tended convoluted, ineffective, inefficient, and unaccountable, will be change to dynamic governance. This will have a significant impact, especially in improving the quality of public services.

DAFTAR PUSTAKA

- Black's Law Dictionary*, Thomson West, Eight Edition, 2004
- Eko Prasajo, *Memantapkan Reformasi Administrasi Untuk Mewujudkan Pemerintahan Demokratis Dan Pembangunan Berkeadilan*, Pidato yang disampaikan pada
- Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional (Praktik Ketatane-garaan Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara 1945)*, Jakarta: Konstitusi Press, 2011
- Kemitraan, *Menuju Masyarakat yang Cerdas dan Pemerintah yang Responsif (Laporan Eksekutif Indonesia Governance Index 2012)*, Jakarta 2012
- Muh.Jufri Dewa, *Hukum Administrasi Negara dalam perspektif pelayanan publik*, Kendari: Unhalu Press, 2011
- Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014
- World bank, <http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports>, terakhir diakses pada September 2014.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah